



# Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi dalam Distribusi Hasil Pertanian Perspektif Ekonomi Islam

Listika Putri Ayu Lestari Nst<sup>\*</sup>, Nurbaiti, Ahmad Muhaisin B Syarbaini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>\*listikaputri899@gmail.com, <sup>2</sup>nurbaiti@uinsu.ac.id, <sup>3</sup>ahmadmuhaisin@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: listikaputri899@gmail.com

Submitted: 27/07/2025; Accepted: 13/08/2025; Published: 13/08/2025

**Abstrak**—Sektor pertanian di Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ekonomi nasional, dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan sumbangan devisa yang signifikan dari agribisnis. Meskipun hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal dan meningkatkan pendapatan petani, distribusi hasil pertanian masih menghadapi tantangan ketidakmerataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas distribusi hasil pertanian di Kota Medan, dengan fokus pada saluran distribusi yang ada, termasuk pasar tradisional dan ritel modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, yang terdiri dari petani, pedagang, dan akademisi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk memahami dinamika distribusi dan keadilan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan perbedaan harga antara petani dan konsumen masih menjadi masalah utama. Selain itu, faktor-faktor seperti infrastruktur distribusi dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efisiensi distribusi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam sistem distribusi, termasuk penguatan infrastruktur dan dukungan bagi petani lokal, untuk mencapai distribusi hasil pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan petani dan konsumen dapat terjamin secara lebih merata, serta menciptakan model ekonomi yang berbasis keadilan di tingkat lokal dan nasional.

**Kata Kunci:** Distribusi Hasil Pertanian; Keadilan Ekonomi; Kebutuhan Pangan; Infrastruktur; Kebijakan Pemerintah.

**Abstract**—The agricultural sector in Medan City holds significant potential to contribute to the national economy through high employment absorption and substantial foreign exchange earnings from agribusiness. Although agricultural products such as rice, corn, and soybeans play a vital role in meeting local food needs and increasing farmers' income, the distribution of these products still faces challenges related to inequality. This study aims to explore the effectiveness of agricultural product distribution in Medan City, focusing on existing distribution channels, including traditional markets and modern retail outlets. This research adopts a qualitative approach with a total of 30 respondents, consisting of farmers, traders, and academics. The data analysis technique used is thematic analysis to understand the dynamics of distribution and economic justice within the framework of Islamic economics. The findings reveal that inequality in access to resources and price disparities between farmers and consumers remain major issues. Moreover, factors such as distribution infrastructure and government policies significantly influence the efficiency of distribution. This study recommends improvements in the distribution system, including strengthening infrastructure and providing support for local farmers, to achieve a more just and sustainable distribution of agricultural products. Ultimately, these efforts are expected to ensure more equitable welfare for both farmers and consumers while promoting a justice-based economic model at both local and national levels.

**Keywords:** Agricultural Product Distribution; Economic Justice; Food Needs; Infrastructure; Government Policy.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam menunjang perekonomian nasional, termasuk di Kota Medan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dari sektor pertanian, baik dalam menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa melalui ekspor komoditas, maupun sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri hilir (Kota, 2021). Produk unggulan seperti padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan buah-buahan tropis tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi dikembangkan untuk pasar nasional dan internasional. Namun demikian, meskipun secara agregat sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian kota, distribusi hasil pertanian di Kota Medan masih belum merata dan menghadapi berbagai persoalan struktural.

Distribusi hasil pertanian yang tidak adil dan tidak efisien di Medan mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, infrastruktur logistik yang belum optimal, serta ketergantungan terhadap pihak ketiga seperti tengkulak yang menyebabkan disparitas harga antara petani dan konsumen akhir. Beberapa wilayah di kota ini, seperti Medan Tembung, Medan Tuntungan, dan Medan Marelان, masih menjadi sentra pertanian yang memasok kebutuhan sayur-mayur dan buah-buahan lokal, namun hasil produksi tidak sepenuhnya diserap oleh pasar lokal dan justru banyak disalurkan ke kota lain atau diekspor (Indrawati, 2024). Hal ini menimbulkan permasalahan ketersediaan pangan lokal dan memicu lonjakan harga di beberapa kawasan yang akses distribusinya terbatas. Tingginya biaya transportasi dan margin keuntungan dari perantara juga memperparah ketimpangan harga, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses bagi konsumen serta ketimpangan pendapatan bagi petani.

Dalam beberapa kajian terdahulu, ketimpangan distribusi pertanian telah dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek teknis hingga kebijakan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas distribusi



hasil pertanian dalam bingkai ekonomi Islam, terutama di daerah perkotaan seperti Medan. Padahal, pendekatan ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang menekankan pada prinsip keadilan (*ʿadl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kesejahteraan bersama (*masalahah*) sebagai dasar kegiatan ekonomi (Zainollah & Ghufron, 2025). Pendekatan ini melihat bahwa distribusi tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan etis, serta menuntut adanya penghormatan terhadap hak petani, transparansi dalam perdagangan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi (Hanafi Hrp et al., 2024). Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan distribusi di Medan yang dipengaruhi oleh modernisasi ekonomi, globalisasi pasar, dan intervensi kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya pada sektor pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi hasil pertanian di Kota Medan, mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam diterapkan, serta mengkaji peran kebijakan dan infrastruktur distribusi dalam menciptakan ketimpangan atau efisiensi distribusi. Fokus utama diarahkan pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai, yang selama ini menjadi penopang pangan lokal namun belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana keterlibatan pasar tradisional, ritel modern, dan saluran distribusi alternatif dalam menentukan harga dan jangkauan hasil pertanian. Pendekatan ini penting untuk menemukan celah dalam sistem distribusi yang ada, serta menyusun strategi berbasis nilai-nilai Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi yang menyeluruh.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kondisi krisis distribusi pangan lokal yang berkelanjutan, di mana distribusi yang berorientasi pada keuntungan semata justru menimbulkan fluktuasi harga dan keterbatasan akses masyarakat terhadap produk pertanian lokal. Ketidaksiharian antara tujuan ideal distribusi yakni kesejahteraan masyarakat dengan praktik ekonomi yang menekankan efisiensi pasar dan laba maksimal telah menimbulkan kesenjangan sosial yang nyata (Oktaviana, 2023). Oleh karena itu, distribusi yang adil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pembaruan sistem distribusi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti penguatan zakat pertanian, sistem kemitraan berbasis syariah, dan distribusi aset negara secara merata (Huda & Fauziah, 2024).

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian distribusi pertanian berbasis ekonomi Islam, yang selama ini masih minim dalam konteks perkotaan. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha agribisnis, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan dan strategi distribusi yang lebih adil, transparan, dan partisipatif. Dengan mengembangkan sistem distribusi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, Kota Medan berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal dan keadilan sosial ekonomi. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan model distribusi berbasis nilai pada skala nasional dan internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru karena mengkaji distribusi hasil pertanian dari perspektif ekonomi Islam dalam konteks urban (kota besar) seperti Medan sesuatu yang belum banyak dilakukan sebelumnya. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti distribusi di wilayah pedesaan. Selain itu, studi ini mengintegrasikan dimensi kebijakan fiskal daerah (APBD) dan strategi ekonomi syariah dalam satu kerangka distribusi pangan yang adil, menjadikannya model yang potensial untuk replikasi di kota lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Umar Sidiq, 2019), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik distribusi hasil pertanian di Kota Medan dalam perspektif ekonomi Islam. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali realitas sosial-ekonomi secara kontekstual, termasuk persepsi, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh berbagai aktor distribusi pertanian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara. Secara akademik, pemilihan Kota Medan memiliki dasar yang kuat karena kota ini merupakan wilayah urban dengan karakteristik distribusi hasil pertanian yang kompleks, melibatkan pasar tradisional, pedagang perantara, koperasi, dan pemerintah daerah. Medan juga merupakan pusat perdagangan dan logistik utama di Sumatera Utara, namun belum banyak dikaji dalam literatur distribusi hasil pertanian berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada konteks pedesaan, sehingga kajian ini memiliki relevansi empiris untuk mengisi kekosongan studi yang ada.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang, terdiri dari tiga petani yang berdomisili di pinggiran Kota Medan, dua pedagang pasar tradisional, dua pengurus koperasi tani, satu perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Medan, satu pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah, dan satu akademisi yang ahli dalam bidang ekonomi Islam. Responden dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam rantai distribusi hasil pertanian. Dari sisi demografi, para responden memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang bervariasi, sehingga dapat menggambarkan keragaman sudut pandang dan memberikan representasi yang memadai terhadap realitas distribusi di lapangan. Penelitian ini berangkat dari tiga rumusan pertanyaan: pertama, bagaimana praktik distribusi hasil pertanian di Kota Medan saat ini? Kedua, sejauh mana peran kebijakan publik daerah, khususnya dalam konteks APBD, mendukung terwujudnya distribusi yang adil dalam perspektif ekonomi Islam? Dan ketiga, bagaimana konsep keadilan ekonomi dalam Islam dapat diimplementasikan dalam sistem distribusi hasil pertanian di wilayah urban?



Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada seluruh responden, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Daerah dan dokumen APBD Kota Medan, serta studi literatur dari jurnal-jurnal bereputasi yang relevan dengan topik distribusi, ekonomi Islam, dan kebijakan publik daerah. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari masing-masing responden dianalisis untuk menemukan pola tematik yang menggambarkan realitas distribusi di lapangan serta sejauh mana nilai-nilai keadilan ekonomi Islam tercermin dalam praktik distribusi tersebut.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Data dari berbagai narasumber dibandingkan satu sama lain untuk menghindari bias informasi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selain itu, teknik member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada beberapa responden guna memastikan keakuratan makna yang ditangkap peneliti. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga keabsahan hasil temuan dan meningkatkan kepercayaan terhadap interpretasi data (Sugiyono, 2016).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari keterkaitan antara konsep distribusi, keadilan ekonomi, dan ekonomi Islam. Ketimpangan distribusi hasil pertanian menjadi latar belakang permasalahan utama yang dianalisis melalui pendekatan dua sisi, yaitu strategi mikro berupa penguatan lembaga distribusi syariah seperti koperasi tani dan penerapan akad syariah seperti muzara'ah, serta strategi makro yang mencakup kebijakan fiskal daerah melalui alokasi anggaran APBD. Keseluruhan strategi ini ditujukan untuk menciptakan sistem distribusi yang berkeadilan bagi petani dan konsumen. Kerangka ini divisualisasikan dalam Gambar 1 sebagai bentuk representasi logis hubungan antarvariabel dan sebagai pemenuhan panduan jurnal yang mewajibkan adanya diagram kerangka berpikir. Berikut disajikan Kerangka Berpikir yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan distribusi, pendekatan ekonomi Islam, dan strategi kebijakan yang diusulkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam distribusi hasil pertanian di Kota Medan.



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi hasil pertanian di Kota Medan menjadi permasalahan utama yang ditangani melalui strategi berbasis prinsip ekonomi Islam. Strategi ini terbagi ke dalam dua level: mikro (seperti penguatan koperasi syariah dan akad muzara'ah) serta makro (seperti kebijakan harga adil dan pemanfaatan APBD untuk mendukung infrastruktur distribusi). Keseluruhan strategi bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi bagi petani dan konsumen.

## 2.1 Kajian Teori

### 2.1.1 Distribusi

Teori distribusi mengacu pada cara barang dan jasa disebarkan dari produsen ke konsumen akhir. Dalam konteks hasil pertanian, distribusi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan mekanisme pasar. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi dan fasilitas penyimpanan, berperan



penting dalam memastikan bahwa produk pertanian dapat mencapai berbagai wilayah dengan efisien. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, hasil pertanian mungkin terhambat dalam proses distribusinya, mengakibatkan ketidakmerataan akses di berbagai daerah (Ihsan Abdullah et al., 2022).

Kebijakan ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam distribusi hasil pertanian. Kebijakan yang mendukung sektor pertanian melalui subsidi, pelatihan, atau pengembangan pasar lokal dapat meningkatkan efisiensi distribusi. Sebaliknya, kebijakan yang lebih fokus pada sektor industri atau komersial tanpa memperhatikan sektor pertanian dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan distribusi produk. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang seimbang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pertanian dapat didistribusikan secara adil (Soemitra et al., 2022).

Selain itu, mekanisme pasar seperti rantai pasokan dan peran perantara juga memengaruhi distribusi. Rantai pasokan yang efisien melibatkan koordinasi antara petani, pedagang, dan pengecer untuk memastikan bahwa produk sampai ke konsumen dengan kualitas dan harga yang wajar. Perantara yang tidak efisien atau monopoli dalam rantai distribusi dapat menyebabkan harga tinggi dan keterbatasan akses di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori distribusi membantu dalam merancang sistem yang lebih adil dan efektif untuk mendistribusikan hasil pertanian secara merata.

Dalam teori ekonomi konvensional, distribusi barang dan jasa diasumsikan bekerja secara efisien dalam kondisi pasar sempurna (*perfect competition*), di mana semua pelaku memiliki informasi sempurna, tidak ada hambatan masuk pasar, dan tidak terjadi monopoli. Namun dalam kenyataannya, terutama pada distribusi hasil pertanian, kondisi ini jarang terjadi karena adanya *asymmetric information* antara petani, tengkulak, dan konsumen.

Teori keadilan distributif seperti yang dikemukakan oleh (Huda & Fauziyah, 2024) dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa distribusi yang adil harus menguntungkan kelompok yang paling tidak diuntungkan. Perspektif ini relevan dalam menilai kondisi petani yang cenderung mendapat porsi paling kecil dari rantai distribusi. Selain itu, teori informasi pasar menyatakan bahwa distorsi harga dan ketidakefisienan distribusi sering kali disebabkan oleh informasi yang tidak merata, yang memperburuk posisi tawar petani.

Teori-teori ini menjadi pembanding penting terhadap pendekatan ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga keadilan (*ʿadl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kesejahteraan sosial (*maslahah*).

### 2.1.2 Distribusi Hasil Pertanian

Distribusi hasil pertanian melibatkan proses penyebaran produk dari petani atau produsen ke konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, fasilitas penyimpanan, dan jaringan pasar. Infrastruktur yang kuat dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pertanian, seperti buah, sayuran, dan biji-bijian, dapat mencapai berbagai wilayah tanpa mengalami kerusakan atau pembusukan. Fasilitas penyimpanan yang memadai juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kualitas produk selama proses distribusi (Zainollah & Ghufron, 2025).

Selain infrastruktur, kebijakan ekonomi dan dukungan pemerintah berpengaruh besar terhadap distribusi hasil pertanian. Kebijakan yang mendukung sektor pertanian melalui subsidi, insentif, atau program pengembangan pasar dapat membantu memperlancar distribusi dan mengurangi ketidakmerataan. Namun, jika kebijakan lebih mengutamakan sektor industri atau komersial tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pertanian, hasil pertanian mungkin tidak didistribusikan secara optimal, mengakibatkan harga yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di beberapa daerah (Fuadi et al., 2021).

Mekanisme pasar dan peran perantara dalam rantai distribusi juga mempengaruhi distribusi hasil pertanian. Rantai pasokan yang efisien melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani hingga pengecer, dan memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan harga yang wajar. Adanya perantara yang tidak efisien atau monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi, dengan beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan atau harga yang tidak terjangkau. Memahami dan mengelola mekanisme ini dengan baik adalah kunci untuk mencapai distribusi hasil pertanian yang adil dan efektif.

Distribusi hasil pertanian di seluruh Indonesia melibatkan jaringan kompleks yang mencakup berbagai saluran dari produsen hingga konsumen akhir. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai dipanen di berbagai daerah dan kemudian didistribusikan melalui pasar tradisional, ritel modern, serta saluran distribusi alternatif seperti *ecommerce* dan sistem rantai pasokan terintegrasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan hasil panen, penyimpanan di gudang, hingga transportasi menggunakan armada truk dan kapal. Sistem distribusi ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan pangan di berbagai wilayah, dengan memperhatikan kestabilan harga dan kualitas produk.

Di Kota Medan, distribusi hasil pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Sebagai salah satu pusat produksi utama di Sumatera Utara, Medan menjadi titik distribusi utama bagi hasil pertanian dari daerah sekitarnya. Padi, jagung, dan kedelai yang dihasilkan di sekitar Medan sering kali dialirkan ke pasar-pasar tradisional di kota ini dan sekitarnya. Selain itu, produk pertanian dari Medan juga didistribusikan ke berbagai wilayah lain di Indonesia, baik melalui jaringan pasar lokal maupun saluran ekspor, membantu memenuhi kebutuhan pangan di seluruh negeri.

Fokus pada distribusi di Kota Medan mengungkapkan pentingnya infrastruktur dan efisiensi dalam sistem distribusi. Penelitian mengenai distribusi hasil pertanian di Medan menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti aksesibilitas pasar, kualitas jalan, dan kebijakan pemerintah mempengaruhi aliran barang dari petani ke konsumen.



Selain itu, evaluasi distribusi di Medan mencakup analisis tentang bagaimana harga yang diterima oleh petani dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir, serta bagaimana distribusi tersebut mencerminkan keadilan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika distribusi di Medan, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih adil dan efisien, mendukung kesejahteraan petani, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik.

Distribusi hasil dalam konteks ekonomi memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan dalam distribusi menjadi prinsip yang sangat ditekankan. Al-Qur'an menyebutkan hal ini dengan jelas, salah satunya dalam Surah Al-Anfal ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْفِيزِ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa apa saja yang dapat dirampas dari harta rampasan yang diperoleh oleh Rasul dan untuk orang-orang yang beriman, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul, dan untuk yatim, fakir, dan orang-orang yang dalam perjalanan.”

Ayat ini menekankan pentingnya mendistribusikan hasil dan kekayaan secara adil kepada semua pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang diperoleh harus disalurkan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi juga kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat seperti yatim piatu dan orang miskin.

Lebih lanjut, dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah juga berfirman tentang pentingnya memberikan sedekah dan zakat kepada mereka yang membutuhkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِمَا نُنْفِئُكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَءَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...”

Dalam konteks ini, distribusi tidak hanya berkaitan dengan hasil pertanian atau produk ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial untuk membantu sesama. Dengan mendistribusikan kekayaan secara adil, masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup layak.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an tentang distribusi hasil menunjukkan bahwa keadilan dan perhatian terhadap sesama adalah pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam distribusi ekonomi akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 2.1.3 Prinsip keadilan ekonomi

Prinsip keadilan ekonomi berfokus pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil dalam masyarakat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, dan layanan dasar. Keadilan ekonomi berusaha mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dengan menerapkan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan penyediaan akses yang lebih baik kepada berbagai layanan dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat (Pangestika, 2023).

Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dan pemikir Muslim abad ke-14, dikenal sebagai salah satu pelopor ilmu sosial dan ekonomi. Dalam karyanya yang terkenal,

“Muqaddimah,” ia mengemukakan beberapa pandangan penting tentang ekonomi yang masih relevan hingga saat ini.

Salah satu pendapat utama Ibnu Khaldun adalah bahwa ekonomi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya “asal” (asabiyyah), yaitu solidaritas sosial dan kohesi kelompok, dalam mempengaruhi kemakmuran ekonomi suatu masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat cenderung lebih mampu mengelola sumber daya dan menciptakan kesejahteraan (Indrawati, 2024).

Ibnu Khaldun juga membahas pentingnya produksi dan distribusi dalam ekonomi. Ia menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya bergantung pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam pandangannya, kegiatan ekonomi harus melibatkan inovasi dan peningkatan produktivitas untuk mencapai kemakmuran.

Selain itu, Ibnu Khaldun memperingatkan tentang dampak negatif dari pajak yang tinggi dan pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Ia berpendapat bahwa terlalu banyak pajak dapat mengurangi insentif bagi individu dan pengusaha untuk berproduksi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi menekankan hubungan antara faktor sosial, politik, dan ekonomi, serta pentingnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan distribusi kekayaan secara adil. Pendapatnya memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika ekonomi yang masih relevan hingga saat ini.

Dalam praktiknya, keadilan ekonomi melibatkan berbagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi.



Ini termasuk penerapan sistem pajak yang progresif, di mana mereka yang berpendapatan lebih tinggi membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi untuk mendukung program sosial dan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadilan ekonomi juga mempromosikan perlindungan hak-hak pekerja, pendidikan yang berkualitas, dan akses terhadap layanan kesehatan, semua aspek yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan individu dan pengurangan ketimpangan (Oktaviana, 2023).

Selain itu, prinsip keadilan ekonomi mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa keputusan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Pangestika, 2023).

Keadilan ekonomi adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil dan merata. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan ini diungkapkan dengan jelas, menunjukkan bahwa Allah menuntut umatNya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Salah satu ayat yang menggarisbawahi hal ini terdapat dalam Surah An Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil...”

Ayat ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban sosial. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa setiap individu dan institusi harus berusaha untuk menyalurkan kekayaan dan sumber daya dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Selain itu, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمَ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi untuk Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabatmu...”

Ayat ini mengajak umat Muslim untuk menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi seseorang. Keadilan ekonomi mencakup perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah, seperti miskin dan yatim piatu, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang mendominasi sumber daya secara tidak adil.

Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam juga mengandung unsur keseimbangan, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagian yang layak dari hasil produksi. Dalam Surah Al-Hadid ayat 25, Allah menyatakan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقَومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Kami mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan, agar manusia dapat menjalankan keadilan...”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya dengan tujuan untuk memastikan keadilan di antara umat manusia. Dengan menegakkan keadilan ekonomi, umat Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga harmonis dan beradab.

Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Islam adalah landasan untuk mencapai kesejahteraan yang merata, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil dan mendapatkan haknya secara proporsional. Implementasi prinsip-prinsip ini akan membantu membangun masyarakat yang beretika dan sejahtera, selaras dengan ajaranajaran Al-Qur'an.

#### 2.1.4 Teori Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal Pangan

Teori keuangan publik menyatakan bahwa intervensi negara melalui instrumen fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mengoreksi ketimpangan distribusi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Imsar Imsar et al., 2024). Fungsi distribusi dari kebijakan fiskal ini menjadi sangat penting terutama dalam sektor-sektor yang rentan terhadap ketimpangan pasar, seperti pertanian. Dalam konteks distribusi hasil pertanian, peran fiskal pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dimaksimalkan sebagai instrumen untuk memperbaiki struktur distribusi yang timpang.

Pemerintah Kota Medan, misalnya, dapat mengalokasikan belanja daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur distribusi seperti gudang penyimpanan hasil panen (cold storage), pasar tani berbasis digital, perbaikan akses jalan menuju sentra pertanian, serta pemberian subsidi logistik dan transportasi hasil pertanian ke pasar. Belanja ini juga dapat diarahkan untuk mendukung koperasi petani dan lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis komunitas agar petani memiliki akses terhadap rantai distribusi yang lebih adil dan efisien.



Strategi fiskal semacam ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga berfungsi sebagai alat stabilisasi harga pangan dan instrumen perlindungan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga. Ketika APBD digunakan untuk memperkuat rantai distribusi, maka risiko kelangkaan dan gejolak harga dapat dikendalikan, sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal. Dengan demikian, teori keuangan publik menyediakan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk mendukung distribusi hasil pertanian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kompleksitas ekonomi seperti Kota Medan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Distribusi hasil pertanian di Kota Medan secara keseluruhan didominasi oleh pasokan lokal yang berasal dari kabupaten-kabupaten penghasil di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat. Komoditas yang paling banyak didistribusikan ke Medan mencakup beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Berdasarkan data, pasokan hasil pertanian ini mencukupi sebagian besar kebutuhan harian masyarakat Medan untuk bahan pangan pokok seperti beras dan sayuran hijau, meskipun tingkat kecukupan dapat berfluktuasi tergantung musim tanam dan kondisi panen.

Selain produk pangan lokal, Medan juga menerima pasokan dari provinsi lain di Indonesia untuk beberapa jenis komoditas yang tidak dapat dipenuhi secara lokal, seperti jagung dan cabai merah. Meski demikian, ketersediaan produk-produk ini juga mengalami ketidakseimbangan karena distribusi yang terhambat oleh kondisi cuaca, biaya transportasi, dan faktor infrastruktur. Akibatnya, ketersediaan beberapa komoditas sering kali tidak stabil sepanjang tahun, terutama saat cuaca ekstrem yang memengaruhi hasil panen.

Namun, beberapa komoditas yang tidak dihasilkan di dalam negeri atau tidak cukup diproduksi di tingkat nasional masih harus diimpor. Produk seperti bawang putih, gandum, dan kedelai merupakan contoh komoditas yang sering diimpor karena kebutuhan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, produk daging sapi yang sebagian besar berasal dari luar negeri juga mencerminkan ketergantungan impor yang cukup signifikan untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, termasuk di Medan.

Di bawah ini adalah ringkasan hasil wawancara yang mencerminkan pandangan dan pengalaman mereka.

Salah satu responden, Bapak Ahmad, seorang petani dari Desa Suka Maju, menyatakan, "Hasil pertanian kami seringkali tidak sebanding dengan upaya yang kami lakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi harga, mulai dari perantara hingga kebijakan pemerintah." Pendapat ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Siti Aisyah (2020), yang menemukan bahwa ketidakpastian harga hasil pertanian menjadi salah satu tantangan utama bagi petani.

Ibu Rina, seorang pedagang di pasar tradisional, mengungkapkan, "Kami sering kali membeli hasil dari petani dengan harga yang rendah dan menjualnya lebih mahal. Namun, kami juga berusaha untuk tetap memberikan harga yang adil." Hal ini mencerminkan temuan dari penelitian oleh (Huda & Fauziah, 2024) yang menekankan pentingnya peran pedagang dalam menyeimbangkan distribusi hasil pertanian.

Menurut Dr. Faisal, seorang akademisi di bidang ekonomi Islam, "Keadilan dalam distribusi hasil pertanian harus mencakup aspek kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan." Pernyataan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Situmeang, 2018) mengenai keadilan dalam ekonomi yang seharusnya mencakup kesejahteraan semua pihak.

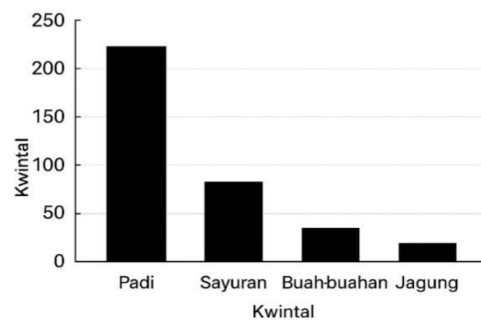
Bapak Surya, perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Medan, mengatakan, "Kami berusaha untuk memberikan dukungan kepada petani melalui program penyuluhan dan pelatihan. Namun, tantangan masih ada dalam hal akses pasar." Pendapat ini mencerminkan temuan dari penelitian oleh (Gultom et al., 2021), yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan distribusi hasil pertanian yang adil.

Melalui hasil wawancara ini, dapat dilihat bahwa keadilan ekonomi dalam distribusi hasil pertanian di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, pandangan dan rekomendasi dari semua responden menunjukkan potensi untuk perbaikan yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian oleh (Pangestika, 2023), yang berjudul Keadilan Ekonomi dalam Pertanian: Studi Kasus di Pedesaan Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian harga hasil pertanian dan akses pasar yang terbatas menjadi masalah utama bagi petani di wilayah pedesaan. Penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan tantangan yang dihadapi petani di Kota Medan.

Penelitian oleh (Lumbanraja & Fahreza, 2023), yang berjudul Peran Pedagang dalam Distribusi Hasil Pertanian di Indonesia menjelaskan bagaimana pedagang berperan sebagai perantara dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan harga yang adil bagi petani dan konsumen. Temuan ini relevan untuk mendukung analisis mengenai peran pedagang di pasar tradisional di Kota Medan.

Penelitian oleh (Azhari Akmal Tarigan et al., 2024), yang berjudul Dukungan Pemerintah terhadap Distribusi Hasil Pertanian di Daerah Perkotaan. Penelitian ini menganalisis efektivitas program pemerintah dalam mendukung petani dan meningkatkan distribusi hasil pertanian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi peran pemerintah di Kota Medan dalam konteks yang lebih luas. Distribusi Hasil Pertanian di Kota Medan dalam Kwintal sebagai berikut:



**Gambar 2.** Distribusi Hasil Pertanian di Kota Medan

Secara umum, pasokan pangan di Medan dapat dikatakan mencukupi kebutuhan dasar, namun terdapat ketimpangan dalam ketersediaan dan harga, terutama untuk komoditas yang bergantung pada impor. Ketergantungan pada impor ini menciptakan risiko ketidakstabilan harga di pasar lokal ketika harga internasional berfluktuasi, serta menurunkan daya saing produk lokal. Distribusi hasil pertanian yang ada saat ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi petani lokal dan masyarakat yang menjadi konsumen akhir.

### 3.2 Pembahasan

Distribusi hasil pertanian yang berlangsung di Kota Medan sebenarnya memperlihatkan potensi produksi lokal yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan hasil dari kabupaten sekitar, sebagian besar komoditas pangan pokok dapat disalurkan dengan baik ke kota ini. Namun, masalah mulai timbul ketika ada ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, terutama pada periode tertentu seperti musim paceklik atau saat panen yang tidak optimal akibat faktor cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi pangan yang ada masih rentan terhadap gangguan eksternal yang memengaruhi stabilitas pasokan. Ketidakstabilan harga pangan pun sering terjadi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan rendah (Daerah & Medan, 2023).

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem distribusi, termasuk penguatan infrastruktur transportasi, penyuluhan kepada petani, dan pengelolaan yang lebih baik terhadap cadangan pangan untuk mengurangi dampak dari fluktuasi musiman atau bencana alam. Penguatan infrastruktur transportasi, seperti pembangunan jalan yang lebih baik dan peningkatan akses ke pasar-pasar utama, akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya logistik, serta mempercepat pengiriman produk dari daerah produksi ke konsumen. Penyuluhan kepada petani juga sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai teknik pertanian yang efisien, serta cara-cara untuk mengelola produksi secara lebih berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan cadangan pangan yang efektif dapat membantu menstabilkan harga dan pasokan pangan selama masa-masa krisis atau ketidakseimbangan pasokan, seperti pada musim paceklik atau bencana alam. Dengan sistem distribusi yang lebih baik dan berkelanjutan, ketahanan pangan dapat terjaga, dan dampak dari gangguan eksternal yang memengaruhi kestabilan pasokan pangan dapat diminimalkan.

Temuan dari wawancara dengan perwakilan Dinas Pertanian Kota Medan menunjukkan bahwa intervensi fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum maksimal dalam mendukung distribusi hasil pertanian secara adil dan efisien. Selama ini, alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada aspek produksi dan subsidi pupuk, sementara infrastruktur distribusi seperti gudang penyimpanan hasil panen, cold storage, dan perbaikan akses jalan ke sentra produksi belum menjadi prioritas utama. Minimnya alokasi untuk infrastruktur logistik ini berdampak pada tingginya biaya distribusi dan kerugian hasil panen yang tidak tertampung secara optimal.

Selain itu, belum adanya kebijakan fiskal daerah yang secara eksplisit diarahkan untuk menstabilkan harga pangan lokal melalui cadangan logistik daerah atau dukungan distribusi berbasis koperasi petani menyebabkan fluktuasi harga masih sering terjadi. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, serta menurunkan insentif produksi bagi petani lokal. Padahal, jika alokasi fiskal diarahkan secara tepat ke sektor distribusi pangan, maka stabilitas harga pangan dapat dicapai dan inflasi daerah dapat ditekan.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan publik daerah yang lebih berpihak pada sektor pertanian secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menekankan bahwa kebijakan fiskal seharusnya berperan sebagai alat untuk redistribusi kesejahteraan dan penguatan sektor produktif lokal. Penguatan anggaran untuk infrastruktur distribusi, integrasi sistem logistik berbasis digital, serta dukungan fiskal terhadap koperasi tani akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem distribusi hasil pertanian yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Kota Medan.

Ketergantungan terhadap distribusi antar-daerah juga mengindikasikan perlunya efisiensi logistik dan infrastruktur yang memadai, agar pengiriman hasil pertanian bisa lebih merata sepanjang tahun. Dengan memperbaiki aspek logistik dan transportasi, distribusi hasil pertanian dari wilayah produsen ke Medan diharapkan bisa berlangsung lebih stabil dan tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga agar harga produk pertanian tidak mengalami fluktuasi tinggi yang membebani konsumen, sekaligus memberi insentif kepada petani lokal untuk memproduksi lebih banyak.



Peningkatan infrastruktur seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan sistem informasi distribusi yang lebih baik dapat mengurangi biaya logistik yang sering kali menjadi kendala dalam rantai pasokan (Nurbaiti Nurlaila & Nasution, 2022).

Selain itu, pengelolaan yang lebih baik terhadap distribusi pangan juga dapat mengurangi pemborosan dan kerugian akibat produk yang rusak atau terbuang selama proses pengiriman. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti cold storage untuk komoditas yang mudah rusak, serta memastikan pengemasan yang lebih efisien dan aman. Teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau rantai pasokan secara real-time, mengurangi pemborosan dan kerugian akibat keterlambatan atau kesalahan dalam distribusi. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas pangan di Medan dapat lebih terjamin, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Peningkatan efisiensi distribusi pangan tidak hanya akan mengurangi kerugian ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau. Pada akhirnya, sistem distribusi pangan yang lebih baik akan menciptakan pasar yang lebih stabil, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, konsumen, serta perekonomian negara secara keseluruhan (Kota, 2021).

Sementara itu, ketergantungan Indonesia pada impor untuk beberapa komoditas seperti gandum, bawang putih, dan kedelai, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketahanan pangan. Ketergantungan impor ini mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas produksi nasional, baik dari segi iklim yang kurang mendukung maupun teknologi pertanian yang belum optimal untuk jenis-jenis komoditas tersebut. Dengan harga internasional yang kerap berfluktuasi, ketergantungan ini berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen, terutama di Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Fluktuasi harga global dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan di pasar domestik, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, ketergantungan ini juga menghambat upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, karena ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat Indonesia lebih rentan terhadap gangguan dalam rantai pasokan global. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian dalam negeri, serta investasi dalam riset dan teknologi pertanian, menjadi hal yang krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemandirian pangan nasional (Imsar Imsar et al., 2024).

Dari sudut pandang keadilan ekonomi, ketergantungan pada impor juga menciptakan risiko bagi daya saing produk petani lokal yang masih harus bersaing dengan produk impor yang terkadang dijual lebih murah di pasar. Produk impor yang lebih murah sering kali membuat petani lokal kesulitan untuk mempertahankan harga jual yang kompetitif, padahal biaya produksi dalam negeri termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku biasanya lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan petani menurun, sementara ketergantungan terhadap pasokan luar negeri tetap tinggi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dalam negeri, baik melalui subsidi bagi petani lokal, pemberian insentif pajak, atau peningkatan teknologi produksi pertanian. Kebijakan yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam sektor pertanian akan memungkinkan peningkatan kapasitas produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dapat memastikan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan peluang bagi petani untuk bersaing secara adil di pasar domestik (Hanafi Hrp et al., 2024).

Tujuan ekonomi dan keuangan Islam didukung oleh moralitas (etika) sebagai nilai dasar utamanya. Ekonomi dan keuangan Islam dianjurkan untuk berlandaskan pada ajaran Islam guna memajukan perekonomian. Moralitas dan ekonomi adalah hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Setiap Muslim harus melaksanakan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam (Soemitra et al., 2022).

Doktrin-doktrin Islam mencakup perintah untuk bersikap adil, terutama terkait dengan penguasa atau umara, perintah untuk memberikan zakat, infaq, dan sedekah kepada orang kaya, hukum warisan, anjuran untuk menjalani hidup sederhana, serta larangan terhadap kelebihan. Baitul Maal jelas sarat dengan cita-cita keadilan, khususnya keadilan distributif dan nilai-nilai kesejahteraan bersama, yang diterapkan oleh negara dan pihak lainnya untuk membantu mereka yang membutuhkan (kesejahteraan sosial) (Huda & Fauziyah, 2024).

Upaya ini akan menciptakan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana produk dalam negeri dapat lebih bersaing dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya, perlu ada kebijakan yang berpihak pada petani lokal, seperti pemberian insentif atau subsidi untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta akses yang lebih mudah ke pasar. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi pertanian dengan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan juga akan membantu petani menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi, sehingga bisa bersaing dengan produk impor. Dengan terciptanya ekosistem pertanian yang lebih baik, produk lokal akan memiliki daya tarik yang lebih besar, sementara harga pangan yang lebih stabil dan terjangkau akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi petani dan konsumen, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah (Imsar Imsar et al., 2024).

Untuk mencapai distribusi hasil pertanian yang adil di Medan dan daerah lain, dibutuhkan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, distributor, dan petani. Hal ini mencakup peningkatan kualitas produksi lokal, perbaikan infrastruktur logistik, dan penetapan regulasi yang menjaga kestabilan harga di pasar. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendorong akses petani terhadap teknologi yang lebih efisien serta pembiayaan yang mudah, sehingga hasil pertanian dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur logistik, seperti penguatan jaringan transportasi dan fasilitas penyimpanan, akan mengurangi pemborosan dan biaya distribusi,



yang seringkali membebani harga jual di pasar. Penetapan regulasi yang jelas dan transparan tentang harga dasar komoditas juga penting untuk menghindari praktik spekulasi yang merugikan petani maupun konsumen. Dengan adanya distribusi yang adil dan stabil, masyarakat akan memperoleh harga pangan yang terjangkau, sementara petani mendapatkan keuntungan yang layak atas usaha mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial antara produsen dan konsumen. Ketika petani mendapat imbalan yang wajar, mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan nasional. Keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen ini juga dapat menciptakan pasar yang lebih transparan dan efisien, di mana harga pangan stabil meskipun terjadi fluktuasi musiman atau gangguan pasokan. Dengan demikian, distribusi pangan yang adil akan memastikan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan di masa depan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kemandirian ekonomi domestik (Fuadi et al., 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Distribusi hasil pertanian di Kota Medan secara umum menunjukkan bahwa pasokan pangan lokal mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, sistem distribusi masih menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi produksi, keterbatasan infrastruktur, ketergantungan terhadap distribusi antar-daerah, serta impor komoditas strategis seperti bawang putih, gandum, dan daging sapi. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses antarwilayah dalam kota serta perbedaan harga antara produsen (petani) dan konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa sistem distribusi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi, baik secara material maupun spiritual sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam. Untuk mewujudkan distribusi hasil pertanian yang adil dan berkelanjutan, diperlukan reformasi menyeluruh, mencakup penguatan sistem logistik, peningkatan kapasitas produksi lokal, perlindungan terhadap petani melalui harga yang stabil, serta kebijakan berbasis nilai yang menekankan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan (*'adl*), keberkahan (*barakah*), dan kesejahteraan bersama (*maslahah*) menjadi alternatif solusi yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan ini. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, ruang lingkup terbatas hanya pada Kota Medan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan kondisi geografis dan struktural yang berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang bersifat subjektif. Ketiga, studi ini belum mengulas secara mendalam peran institusional pemerintah dan lembaga distribusi dalam membentuk sistem distribusi yang adil dan efisien. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan perluasan wilayah analisis sangat disarankan.

#### REFERENCES

- Arifah, S. N., Yusrizal, Y., & Tambunan, K. (2022). Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bener Meriah di Masa Pandemi Covid-19. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 242–251. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1292>
- Azhari Akmal Tarigan, J., Naldo, S. A., Hutagalung, M., & Bustami, R. (2024). Islam and Christianity at Rumah Gadang: The Household Characteristics of Minangnese Interfaith Marriage. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 27–37.
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGIES: Muslimsâ€™ Responses and Sharia Compliance In Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 103–132.
- Daerah, B. R. D. I., & Medan, K. (2023). Analisis Stabilisasi Harga dan Kebutuhan Pokok di Kota Medan.
- Fuadi, F., Marliyah, M., Falahuddin, F., & Mutia, I. (2021). Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 99–104. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.447>
- Gultom, S. A., Dalmaisya Gea, I., & Muda, A. S. (2021). Quality Of Human Resources, Supporting Facilities And Infrastructure, Compliance With Regulations, Application Of Saiba, And Leaders' Commitment To The Quality Of Financial. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(5), 56–62.
- Hanafi Hrp, F., Nur Hasanah, A. M., Yani Siagian, I., Lestari Napitupulu, S., Roudoh Harahap, N., Chairawani, Z., & Hardiansya, Mi. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah dalam Kerja Sama Lahan Pertanian di Desa Susuk Kec.Tigan Derket. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 2745–5963.
- Huda, M. I., & Fauziyah, S. I. (2024). Prinsip Keadilan Pada Zakat Pertanian, Perniagaan, Dan Pertambangan Persepektif Keadilan John Rawls. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 288–301. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i2.13543>
- Ihsan Abdullah, A., Wahyuni Lubis, I., & Muda, A. S. (2022). Explanation of Forensic Accounting and Its Application (Case Some Industry Sector). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(9), 1585–1588. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.195>
- Imsar Imsar, N. N., Isnaini Harahap, P., & Silalahi, R. (2024). The Impact Of The Halal Industry And Islamic Financial Assets On Indonesia's Economic Growth Using The Vector Autoregression (VAR) Approach. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 8(2), 274–287.
- Indrawati, P. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertanian Berkelanjutan: Analisis Kasus Penggarapan 10 Hektar Lahan oleh Mahasiswa STIES Riyadul Jannah Mojokerto di Desa Sumber Sumur, Krembung, Sidoarjo. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3. <https://doi.org/10.58787/fdz.v3i1.56>
- Kota, D. K. P. (2021). Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026 (pp. 1–12).
- Lumbanraja, V., & Fahreza, I. (2023). Politik Pangan: Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.32734/jkpkp.v2i2.13354>
- Mustapa Khamal Rokan. (2017). Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia.



- Ahkam Journal of Sharia, 17(1), 197–227.
- Nurbaiti Nurlaila, M. L., & Nasution, I. (2022). The Impact Of COVID-19 Pandemic On The Income Of Traditional Market Traders In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 2141–2150.
- Oktaviana, D. (2023). *JME* 1 (2) (2023) Analisis Pengembangan Sektor Usaha Pertanian (Kajian Arthasastra) Duwi Oktaviana. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi (JME)*, 1(2), 11–20. <https://www.jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jme>
- Pangestika, W. (2023). Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil ( Mukha>barah ) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.
- Situmeang, I. F. M. (2018). Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 92.
- Soemitra, A., Kusmilawaty, and T. I., & Rahma, F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women’s Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10(7), 1–19.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umar Sidiq. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN* (Anwar Mujahidin (ed.); 1st ed.). CV. Nata Karya.
- Zainollah, M., & Ghufroon, M. I. (2025). Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzara ’ ah pada Sektor Pertanian Banyak masyarakat pedesaan di Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber utama. 7(2), 75–86. <https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.24046>